



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 852/III/2015

I/MARET 2015



DPR Optimalkan Diplomasi Parlemen



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

DPR Optimalkan Diplomasi Parlemen



Ketua DPR RI Setya Novanto berdialog dengan Delegasi Senat Kanada

DPR RI terus berupaya meningkatkan perannya dalam membangun diplomasi dengan negara lain terutama sesama parlemen. Peran ini mendukung politik luar negeri pemerintah atau biasa disebut sebagai *second track diplomacy* sesuai amanat UU no.42/2014 tentang MD3.

“Hari ini kita kedatangan banyak sekali tamu parlemen dari Kanada, kemudian Dubes Rusia, jadi ini adalah bagian dari peran penting DPR sesuai UU MD3 untuk membangun diplomasi internasional dan mendukung politik luar negeri pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/15).

Dalam pembicaraan dengan delegasi Senator Kanada menurutnya disepakati untuk mendorong pemerintah meningkatkan kerja sama di bidang kemaritiman. Latar belakang memiliki garis pantai terpanjang di dunia

membuat kedua negara dapat saling berbagi pengalaman.

Politisi dari Fraksi PKS ini menyebut dalam masa reses ini Pimpinan DPR mempunyai daftar panjang tamu delegasi dari negara sahabat yang menunjukkan peran diplomasi parlemen bisa lebih diefektifkan. “Pada saat yang tepat kita akan membalas kunjungan ini dengan mengirimi delegasi DPR, seperti tadi Parlemen Kanada dan Dubes Rusia mengundang kita berkunjung ke sana,” tutur dia.

Bicara pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyambut baik paparan yang disampaikan Dubes Rusia Mikhail Galuzin. Dalam pertemuan tersebut ia memperjuangkan agar Pemerintah Rusia mendukung upaya Pemerintah Indonesia memiliki lahan di sana.

“Kami menggunakan kesempatan ini meminta Pemerintah Rusia mengizinkan memiliki tanah untuk Gedung

KBRI dan tempat tinggal dubes. Hukum disana memang tidak ada jual beli tanah, yang ada hanya dipinjamkan. Tapi kita bisa menyampaikan asas resiprokal, mereka boleh punya tanah disini bahkan banyak. Kita harap ada pengecualian karena pembelian ini bukan aset pribadi tapi untuk negara,” demikian Tantowi.

Diplomasi dengan Kanada

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, kerja sama Indonesia-Kanada selama ini sudah berjalan cukup baik, dengan nilai total perdagangan mencapai 2,4 miliar dolar AS pada 2013. “Ke depan, kami berharap nilai perdagangan kedua negara dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya ketika menerima kunjungan kehormatan 11 anggota Senat Kanada dipimpin, Raynell Andreychuck didampingi Dubes Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash.

Menurut Novanto, nilai investasi Kanada di Indonesia hingga kuartal I tahun 2014 mencapai 261,6 juta dolar AS bisa terus ditingkatkan. “Kami DPR RI periode 2014-2019 siap melanjutkan kerja sama antar parlemen kedua negara yang selama ini berjalan baik,” katanya.

Ia mengatakan kerja sama antar-parlemen perlu dikembangkan oleh kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang sudah terjalin. Indonesia dan Kanada lanjut dia, sudah menjalin kerja sama di bidang ekonomi, penanganan terorisme, kejahatan transnasional, hukum dan Hak Asasi Manusia, pendidikan, penerbangan, peternakan, pertanian dan kehutanan serta sosial budaya. (iky/mp) foto: eka hindra/parle/hr



Ketua DPR Terima Dubes Rusia

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhael Galuzin. Pertemuan membahas upaya meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang termasuk hubungan antar parlemen.

“Hubungan dengan Rusia menjadi prioritas utama bagi kita, di bidang ekonomi, pertahanan termasuk hubungan parlemen dua negara. Kita mengundang parlemen Rusia untuk datang berkunjung ke Indonesia,” kata Ketua DPR dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/15).

Politisi Partai Golkar ini menyebut undangan kepada Ketua Parlemen Rusia akan disampaikan melalui kedutaan Rusia di Indonesia. Ia juga memaparkan salah satu peluang investasi bagi pengusaha dari negara yang sering disebut beruang merah ini adalah pengadaan energi listrik.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang hadir dalam pertemuan tersebut mengingatkan hubungan Indonesia-Rusia sudah dirintis sejak lama oleh para pendiri bangsa. “Ikatan yang pernah dibuat oleh para pendiri bangsa itu perlu kita jaga dan menjadi



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima Dubes Rusia

titik tolak untuk langkah selanjutnya,” tuturnya.

Sementara itu Dubes Rusia melaporkan saat ini sejumlah investasi di bidang ekonomi telah berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia seperti pembangunan jalur kereta api di Kaltim dan tambang bouksit di Kalbar. Ia meyakini kerja sama di bidang ekonomi ini akan

terus meningkat di masa akan datang.

Pada bagian lain secara khusus ia mengundang pimpinan DPR untuk hadir dalam acara *roundtable* di Jakarta memperingati 70 tahun kemenangan Rusia dan sekutunya atas fasisme Nazi dan militerisme Jepang. (iky) foto: eka hindra/parle/hr

DPR Bahas Pencalonan Kapolri Usai Reses 23 Maret

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembahasan Calon Kapolri Badrodin Haiti akan dilakukan usai reses pada tanggal 23 Maret yang akan datang. “Sekarang ini masa Reses dan kita baru menerima surat Presiden ketika sidang paripurna sudah di tutup tanggal 18 Februari lalu,” katanya di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini, pada dasarnya pencalonan Kapolri adalah hak prerogatif presiden dan itu harus dihargai. Namun demikian, ada prosedur yang harus dikaji, kenapa pada pencalonan Kapolri (BG) yang lalu, Presiden sudah melakukan suatu seleksi juga tetapi kemudian dibatalkan dan diganti dengan yang baru. Kasus seperti ini diharapkan tidak terulang kembali.

Harapannya ke depan, Fadli mene-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

gaskan, nanti tidak akan lagi kisruh yang merugikan kedua lembaga baik KPK dan Polri. “Kita ingin kedua lembaga ini bertugas sesuai dengan tupoksinya,

tidak ada juga *abuse of power*. Dengan begitu kita akan mempunyai tatanan institusi yang jelas pada koridornya dan tidak *overlapping*,” tukasnya.

Terkait dengan masalah-masalah temporer termasuk hukuman mati yang akan dikenakan kepada pengedar narkoba asal Brazil dan Australia, Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini menghimbau negara lain untuk menghargai hukum yang ada di Indonesia. Pasalnya, masalah narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang besar sehingga kita ingin agar ada efek yang menjerakan.

“Inilah saya kira tantangan diplomasi kita ke depan. Jangan sampai negara-negara sahabat salah paham atau salah persepsi kemudian menjauh dari kita,” ujar Fadli menambahkan. (mp,ds,hf) foto: eka hindra/parle/hr

DPR Terkesan Pemilu di Uzbekistan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Delegasi Parlemen Indonesia di Kemenlu Uzbekistan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku terkesan dengan Pemilihan Umum Parlemen, yang telah berlangsung di Uzbekistan, beberapa waktu lalu. Dari hasil pengamatannya di lima Tempat Pengamatan Suara di Kota Tashkent, pemilu berjalan damai, dan tidak ada satupun laporan kekerasan yang diterima *Elections Committee*, selaku penyelenggara pemilu.

Demikian disampaikan Fadli saat melakukan kunjungan muhibah ke Uzbekistan, beberapa waktu lalu. Selain untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, kunjungan ini juga untuk memantau pelaksanaan pemilu legislatif di Uzbekistan. Fadli didampingi Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (F-PKS), Anggota Komisi I Firmandez (F-PG) dan Muhammad Syafrudin (F-PAN).

“Pemilu di Uzbekistan berjalan dengan baik dan berlangsung damai. Saya terkesan dengan tersedianya

fasilitas pelayanan kesehatan dan penitipan anak di setiap TPS,” kata Fadli Zon, saat bertemu dengan Pimpinan Parlemen Uzbekistan Athkam Shadmanov, beberapa waktu yang lalu, di Uzbekistan.

Politisi F-Gerindra ini juga mengapresiasi dengan diberikannya kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye, baik melalui media cetak, maupun media elektronik. Dan semua biaya kampanye itu dibiayai oleh pemerintahnya.

“Meskipun cuaca sangat dingin, namun hal tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu terbukti dari angka partisipasi pemilu yang mencapai angka 88 persen lebih. Berarti, tingkat partisipasi politik sangat tinggi dalam pemilu ini,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini.

Selain memantau pelaksanaan pemilu, delegasi Indonesia juga membi-

carakan mengenai hubungan kedua negara. Fadli menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kerjasama kedua negara, ia mengusulkan agar segera dibentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Antar Parlemen Indonesia-Uzbekistan.

“Usulan ini pernah disampaikan oleh delegasi Indonesia saat mengunjungi Uzbekistan pada 2013 lalu. Namun sampai saat ini belum terealisasi,” imbuh Fadli. Usulan dari delegasi Indonesia ini pun mendapatkan sambutan baik dari Pimpinan Parlemen Uzbekistan, dan berharap grup ini segera terwujud.



Delegasi Parlemen Indonesia saat meninjau TPS Uzbekistan

Pada pertemuan ini, kedua belah pihak juga sepakat untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama bidang sosial, budaya dan pariwisata. Banyaknya situs bersejarah, terutama yang berkaitan dengan perkembangan pengajaran agama Islam, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Uzbekistan. (sf) foto: emce&kmn/parle/hr

DPR Minta Kompetisi ISL Tetap Berjalan

DPR meminta Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 yang pelaksanaannya ditunda oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Seharusnya, kompetisi ini dimulai pada pekan lalu, dengan laga pembuka pertandingan antara Persib Bandung vs Persipura Jayapura.

Demikian hasil pembicaraan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang didampingi Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, saat menerima Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin beserta jajaran, dan pengurus PT Liga Indonesia, serta perwakilan 18 Pengurus Klub ISL.

Sebagaimana diketahui, Kemenpora menunda kome-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya saat menerima Ketua Umum PSSI beserta jajaran

tisi ISL setelah mendapat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Menpora memberikan waktu dua pekan bagi tim-tim ISL untuk melengkapi syarat yang diminta, hasil rekomendasi BOPI, salah satunya terkait pembayaran pajak. Akhirnya, PT Liga Indonesia memutuskan untuk menunda jadwal *kick off* ISL hingga 4 April 2015.

Akibat penundaan kompetisi ini, klub peserta ISL sangat dirugikan. Bahkan, dalam surat FIFA yang dikirim kepada PSSI, Kamis (19/02/15) lalu, FIFA mengeluarkan ancaman skorsing kepada Indonesia, apabila masalah penundaan laga ISL 2015 tidak bisa diselesaikan. FIFA menunggu semua perkembangan masalah ISL hingga Senin (23/02/15).

“Kemenpora harus bisa menempatkan diri dengan baik, karena kegiatan ini adalah kegiatan bisnis di mana ada hukum sendiri di dalamnya. Biarkan kompetisinya tetap berjalan, Pemerintah tidak perlu terlibat. Pemerintah hanya perlu mengatur regulasi yang baik dan transparan sehingga orang bisa berkompetisi secara sehat,” tegas Fahri, usai pertemuan di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Senin (23/02/15).

Politisi F-PKS ini menambahkan, Kemenpora tidak perlu mengurus masalah perpajakan di PT Liga Indonesia. Ia menilai, jika memang ada keuntungan dari perusahaan yang

disembunyikan dan pajaknya tidak dibayarkan, ada pihak yang lebih tepat mengurus hal itu, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan.

“Itu urusan perpajakan, Kemenpora tidak perlu mengurus pajak. Pajak itu sudah ada yang urus yaitu Kementerian Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Kalau Kemenpora menganggap ada keuntungan yang disembunyikan, dan dianggap mereka (PT Liga Indonesia) mengelola uang masyarakat, negara harus ikut mengawasi melalui BPK. BPK nanti akan memutuskan, bisa memeriksa atau tidak,” tambah Fahri.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini menyayangkan, akibat dari permasalahan ini, pelaksanaan kompetisi harus berhenti. Padahal, menurutnya, kompetisi bisa tetap berjalan, sembari Pemerintah memperbaiki regulasinya. Apakah regulasi di level Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, atau bahkan Undang-undangnya.

“Jangan kemudian kompetisinya itu dihentikan karena dianggap ada pelaksanaan yang tidak baik. Pelaksanaan yang tidak baik itu diperbaiki, kalau melanggar UU, ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau melanggar pajak, ya laporkan kepada petugas pajak. Jangan sedikit-sedikit Pemerintah melakukan intervensi dan terlibat,” imbuhnya.

Untuk itu, tambah Fahri, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Menpora Imam Nahrawi, untuk meminta agar tidak menghambat penyelenggaraan ISL 2015. Ia juga menyarankan, sebaiknya diadakan pertemuan antara Menpora, PSSI, dengan PT Liga kembali, untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut.

“Saya akan bicara dengan Menpora. Kalau bisa nanti ada pertemuan lain. Saya siap jadi fasilitator,” ujar Fahri.

Sementara itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya (F-PD) menyatakan, pihaknya akan segera mengontak Menpora, agar segera memberi kepastian jadwal kompetisi ISL 2015.

“Saya mengusulkan kepada teman-teman (Liga Indonesia), supaya jadwal mereka jangan diganggu. Masalah pajak dan sebagainya tentu itu ada ranahnya tapi ini jangan dijadikan halangan untuk bergulirnya *kick-off* ISL 2015,” kata Politisi asal Dapil Aceh I ini.

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menyatakan, salah satu kerugian klub adalah hancurnya program latihan dan akomodasi klub. (sf,ss,hf), foto : eka hindra/parle/hr.

Perpustakaan NTB Kekurangan Banyak Buku

Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kekurangan banyak buku. Hal tersebut menjadi salah satu aspirasi yang berhasil dihimpun Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja ke Provinsi NTB, Kamis (26/2).

“Perpustakaan provinsi ini masih kekurangan banyak buku yakni sekitar 5,7 juta eksemplar,” ungkap Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya saat memimpin Tim Kunker Komisi X ke

NTB.

Diungkapkan Riefky, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Perpustakaan NTB, jumlah koleksi yang dimiliki saat ini 309.453 dengan 95.239 judul buku. Sementara jumlah rasio kebutuhan buku masyarakat NTB sebesar kurang lebih 6 juta eksemplar. Sehingga masih memerlukan sekitar 5,7 juta eksemplar.

Jumlah desa dan kelurahan yang ada



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

di NTB 1.296, dari jumlah itu sekitar 1.135 desa/kelurahan sudah mendapat bantuan buku, sehingga masih ada 161 desa/kelurahan yang masih membutuhkan bantuan buku.

Selain masih kurangnya buku, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB juga belum terkoneksi dengan perpustakaan yang ada di kabupaten/kota. Koneksi ini sejatinya diperlukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang ada di perpustakaan lainnya.

Minimnya jumlah pustakawan di NTB juga menjadi keluhan yang diterima Komisi X. Saat ini tenaga fungsional pustakawan NTB hanya 22 orang, sementara NTB mem-

butuhkan 50 pustakawan. Sehingga masih dibutuhkan 28 pustakawan untuk perpustakaan Provinsi NTB.

Menanggapi hal tersebut Politisi Dapil Nanggroe Aceh yang didampingi anggota Komisi X lainnya seperti Popong Otje Djundjuna, Edhi Baskoro Yudhoyono, Reni Marlina, Moreno Soeprapto, Kresna Dewananta P, sepakat untuk terus mendukung perpustakaan NTB. Pihaknya akan menyampaikan kepada Perpustakaan Nasional untuk menindaklanjuti keluhan dari Perpustakaan Provinsi NTB tersebut. (Ayu) foto: naefurodji/parle/hr



Anggota Komisi VII DPR Achmad Fariel

Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Fariel mempertanyakan kepada Pertamina EP mengenai ada tidaknya rencana untuk mencari lokasi dan blok yang baru untuk mengeksplorasi minyak.

“Saya melihat di wilayah Sumatera ini *lifting* produksinya makin hari makin turun, jadi apakah ada perusahaan yang sedang mengeksplorasi untuk mencari lokasi minyak yang baru,” tanya Achmad Fariel saat Tim Kunker Komisi VII melakukan rapat dengan SKK Migas, jajaran Pertamina EP, di

Batam, Rabu (25/2).

Fariel menambahkan, bahwa ia melihat kalau produksi *lifting* minyak masih di blok yang lama dan hanya sekedar mempertahankan produksinya.

Menurutnya, jika tetap menggunakan lokasi yang lama dengan hanya memindahkan tempat eksplorasi, hasil yang didapat tidak akan bertambah, “Memang *lifting* produksi naik, tapi sementara, waktunya lebih singkat untuk menghabiskan cadangan di dalamnya,” kata Fariel. (nt) foto : nita juwita/parle/hr.

Kebutuhan Energi Masih Jadi Tantangan di Kepri



Tim Kunker Komisi VII DPR saat meninjau PLTGU Tanjung Uncang, Batam

Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi mengatakan, masalah energi masih menjadi tantangan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terutama peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh ketersediaan dan peningkatan pasokan energi.

Hal itu disampaikan Mulyadi dalam sambutannya pada

pertemuan Komisi VII DPR dengan Gubernur Kepri HM Sani beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) di Tanjung Pinang, Batam, Selasa (24/2). Pertemuan Komisi VII DPR dengan Pemprov Kepri merupakan bagian dari rangkaian acara kunjungan kerja Komisi VII DPR dalam masa reses DPR.

Menurut Mulyadi, masalah di sektor ketenagalistrikan, Provinsi Kepri juga dihadapkan pada keterbatasan pasokan energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. “Terutama di Kepri yang juga masih terdapat masalah pemenuhan kebutuhan listrik, padahal provinsi ini memiliki sumber energi cukup yang masih dapat dikembangkan,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Ia menambahkan, rasio elektrifikasi di beberapa daerah dan khususnya di kawasan perdesaan juga masih relatif minim. “Hal ini menjadi perhatian kita bersama, perlu upaya yang serius untuk mempercepat pembangunan sektor ketenagalistrikan dan pengembangan energi di Provinsi Kepri,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kepri, rombongan Komisi VII DPR dipimpin oleh Mulyadi selaku Ketua Tim rombongan dengan sejumlah Anggota Komisi VII DPR diantaranya; Daryatmo Mardiyanto, Awang Ferdian Hidayat, Falah Amru dari F-PDI Perjuangan, Dito Ganinduto (F-PG), Saiful Bahri Ruray (F-PG), Ramson Siagian (Fraksi Gerindra), Bambang Haryadi (Fraksi Gerindra), Mat Nasir (F-PD), Achmad Fariel (F-PPP), Achmad Amins (Fraksi Nasdem). (nt) foto: nita/parle/hr

DPR: Dahulukan Kebutuhan Energi Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mengatakan pemerintah seharusnya mendahulukan kebutuhan pasokan energi dalam negeri ketimbang menjual ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Ramson Siagian, saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), di Tanjung Pinang, Selasa (24/2). Kunjungan Ramson Siagian ke Pemprov Kepri merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Kepri dalam masa reses DPR.

Ramson mencontohkan seperti halnya penjualan gas ke Singapura. Menurut dia, pemerintah harusnya mendahulukan kebutuhan masyarakat Kepri, bukan menjual gas tersebut ke Singapura.

Kondisi itu membuat pihaknya merasa kasihan dengan masyarakat Kepri. “Seharusnya, listrik di Kepri terang benderang, bukan seperti sekarang sering terjadi pemadaman listrik. Bahkan Natuna pernah mengalami krisis listrik baru-baru ini. Kami akan menayakan permasalahan ini kepada Men-

teri ESDM. Kami juga akan mengawal dan mendesak agar program jangka pendek penyaluran gas ke PLN di Batam dapat direalisasikan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, HM Sani mengatakan izin penambangan gas di Natuna maupun pengeksportan gas ke Singapura dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dia juga tidak mengetahui berapa lama perusahaan tersebut mendapat izin dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kepri, kata dia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut. “Kontribusi yang diberikan ke Kepri berupa dana bagi hasil,” katanya.

Pihaknya mengatakan, Kepri membutuhkan gas Natuna untuk bahan bakar pembangkit listrik. Sebab keterbatasan bahan bakar yang murah dan anggaran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi PT PLN untuk meningkatkan kapasitas listrik.

Menurut dia, permasalahan itu sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat pertemuan di Batam baru-baru ini. “Menteri bersedia membantu, namun



Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kepri,” katanya.

Seperti diketahui, guna melaksanakan tugas kedewanan di bidang pengawasan, Komisi VII DPR melakukan Kunker ke beberapa daerah salah satunya ke Prov Kepri, tim kunker yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi (F-PD), diikuti sejumlah anggota diantaranya, Daryatmo Mardianto, Awang Ferdian Hidayat, Falah Amru dari F-PDI Perjuangan, Ramson Siagian (F-Gerindra), Saiful Bahri Ruray (F-PG), Bambang Hariadi (F-Gerindra), Mat Nasir (F-PD), Achmad Farihal (F-PPP), dan Achmad Amins (F-Nasdem).

(nt) foto: andri/parle/hr

Dua RS di Makassar Perlu Perhatian

Dua rumah sakit (RS) di Makassar, yaitu RS Wahidin Sudirohusodo dan RS Labuan Baji perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun DPR. Banyak pasien menumpuk di satu ruangan, sarana gedung tidak memadai lagi, dan peralatan kesehatan yang tidak lengkap.

Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin (F-PKS) yang mengikuti kunjungan kerja (kunker) ke Makassar, Sulsel, menilai, masih banyak yang perlu dibenahi dari layanan kesehatan terutama di dua RS yang dikunjungi. Di RS Wahidin, pasien membludak hingga menempati ruang IGD dan ICU.

Di RS Labuan Baji, kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Selain pasiennya melebihi daya tampung, juga fisik gedung sudah tak layak. Banyak sarana gedungnya yang rusak. Direktur dua RS tersebut kemudian mengajukan proposal anggaran perbaikan pembangunan RS kepada Tim Kunker Komisi IX DPR.

“Ini harus jadi konsen bersama, baik Dinas Kesehatan,



Tim Kunker Komisi IX DPR saat mengunjungi RS Wahidin Sudirohusodo Makassar

Kementerian Kesehatan, dan Komisi IX. Saya mendorong agar Kemenkes memprioritaskan dua rumah sakit tersebut untuk mendapat alokasi anggaran yang memadai, sehingga layanan kesehatan di Sulsel bisa lebih bagus lagi,” kata Hamid, Rabu (25/2). RS Wahidin sendiri sudah menjadi RS rujukan nasional untuk wilayah Indonesia Timur. Sebagai RS rujukan tentu harus memodernisasi layanannya.

Sementara sebelumnya, dalam pertemuan dengan Wali Kota Makassar, layanan kesehatan coba dimodernisasi dengan melakukan inovasi layanan. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto kepada tim Kunker Komisi IX menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan semacam

kartu debit untuk layanan kesehatan yang bisa digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit tertentu. Selain itu ada *home care* yang memberi akses layanan kesehatan dari rumah ke rumah.

Hamid menilai, dua inovasi layanan kesehatan ini sangat bagus. Dibutuhkan SDM yang handal dan dukungan anggaran yang cukup untuk pengadaan mobil operasional. “Jika program ini ingin dijadikan program unggulan tentu harus mendapat prioritas. Saya sangat mengapresiasi program tersebut,” aku legislator dari Dapil Jateng IV itu.

Pada bagian lain, mantan Anggota DPRD Wonogiri se-

lama tiga periode ini, melihat, di beberapa daerah kerap ditemukan data warga miskin yang jauh lebih banyak daripada data temuan BPS. Data ini mempengaruhi layanan kesehatan kepada masyarakat. Temuan ini harus diklarifikasi lagi termasuk di Sulsel.

Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari BPJS Kesehatan kerap tumpang tindih dengan peserta Jamkesda yang lama. Hampir di semua daerah selalu ditemukan kepesertaan ganda. “Ini harus segera dilakukan validasi data dan verifikasi faktual agar semuanya *clear*,” ungkapnya. (mh) foto: husen/parle/hr

Perhubungan Diminta Beri Tempat Khusus Bagi Kapal Basarnas



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Pelabuhan Lembar, NTB

Keberadaan Badan SAR Nasional (Basarnas) sangat penting dan erat kaitannya dengan pelabuhan dan keselamatan transportasi di laut. Namun kapal-kapal milik Basarnas tidak memiliki dermaga sendiri sebagai tempat sandarnya, dan masih menumpang di dermaga-dermaga milik pelabuhan.

Hal ini mengemuka saat Tim Kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau

langsung Pelabuhan laut Lembar, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Sadarestuwati meminta Kementerian Perhubungan untuk memberikan tempat khusus bagi kapal milik Basarnas. Hal ini penting menurutnya, agar Basarnas bisa bekerja dengan baik.

“Saya selalu melihat di mana-mana

yang namanya Kapal Basarnas ini tidak punya tempat sandar untuk kapalnya, karena tidak memiliki dermaga sendiri. Sehingga selalu menumpang di dermaga-dermaga yang dimiliki oleh pelabuhan,” kata Politisi F-PDI Perjuangan ini.

Senada dengan Sadarestuwati, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis juga meminta Badan Otoritas Pelabuhan untuk menyediakan tempat khusus dermaga bagi kapal-kapal pemerintah termasuk Basarnas.

Dari pemaparan Basarnas, hampir di semua dermaga kapal Basarnas belum ada tempat khusus untuk sandar kapal mereka. Komisi V DPR meminta Basarnas untuk mendata di mana yang sudah punya kapal dan di mana yang belum ada tambatannya supaya bisa dikoordinasikan dengan Direktorat Perhubungan Laut. (Andri) foto: andri/parle/hr

DPR Perlu Menambah Anggaran BLKI

Keberadaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) diakui sangat strategis, tidak saja untuk menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga mencetak angkatan kerja yang mampu berwiraswasta secara mandiri. Untuk itu DPR perlu menambah anggaran bagi BLKI agar tetap hidup.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso dalam kunjungan kerjanya bersama Komisi IX DPR di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/2). Pada pertemuan dengan Kepala BLKI Makassar Muhammad Akbar, Politisi F-PDI Perjuangan itu menyatakan, DPR akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung keberadaan BLKI. Dia menilai, BLKI Makassar sangat rapi dan memadai sebagai tempat latihan kerja.

Menurut Imam, di tengah pemberlakuan moratorium TKI, keberadaan BLKI justru menjadi solusi terbaik. “Untuk mencari kerja tidak harus menjadi TKI atau PNS. Ada BLKI



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso saat mengunjungi BLKI Makassar



yang mengarahkan para pencari kerja untuk hidup mandiri dengan mengasah keterampilan khusus. Para wanita juga tidak perlu menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Ada BLKI yang memberi pelatihan kerja.”

Imam dan beberapa anggota Komisi IX lainnya sempat melihat seorang wanita yang terampil mengutak-atik pera-

latan elektronik. “Ini sangat bagus, seorang wanita bisa menguasai elektronik,” ujarnya. Di BLKI Makassar sendiri ada beberapa ruang *workshop*. Di antaranya manufaktur, otomotif, elektronika, bangunan, teknologi informasi dan komunikasi, garmen, pariwisata, industri kreatif, hingga tata kecantikan. (mh) foto: husen/parle/hr

Komisi V Pantau Pelabuhan Lembar, NTB



Tim Kunker Komisi V DPR di kapal penumpang

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI meninjau langsung aktivitas di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan ini komisi yang membicarakan masalah infrastruktur dan perhubungan ini menyoroti lamanya waktu tunggu sandar dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan yang menjadi penghubung Jawa, Bali dan NTT ini.

“Waktu bongkar muatnya kurang lebih tujuh sampai sepuluh hari bahkan ada yang dua minggu, ini karena keterbatasan panjang dermaganya yang masih belum memadai,” kata Ketua Tim Kunker Fary Djemy Francis saat kunjungan, Selasa (24/2/15).

Ia meminta Pelindo - perusahaan BUMN pengelola pelabuhan segera menambah panjang dermaga yang cukup ramai

dengan aktivitas kapal barang, kapal penumpang PT Pelni dan kapal pesiar. Disamping itu menurutnya manajemen bongkar muat perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.

Fary yang juga Ketua Komisi V ini bersama Tim Kunker berkesempatan memantau aktivitas bongkar muat semen dan pupuk untuk wilayah NTB dan sekitarnya. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mencermati kondisi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan peralatan pekerja bongkar muat (PMB) serta fungsi gudang yang belum optimal.

Sementara itu dalam penjasannya Kepala Cabang Pelindo Lembar, Mujiono mengakui, bongkar muat barang masih bermasalah sehingga mempengaruhi distribusi barang seperti pupuk. Hal ini dikarenakan pola kerja pihak gudang selaku penerima pupuk tidak bisa mengimbangi pelabuhan, sehingga bongkar muat kerap kali molor.

Menurutnya, untuk menambah kapasitas pelabuhan barang pihak Pelindo berencana menambah dermaga seluas 100 meter, hal ini untuk mempercepat bongkar muat. Perhari, jumlah kapal yang sandar enam sampai tujuh kapal, semua kapal itu bisa merapat di dermaga yang ada, namun kecepatan bongkar muat menjadi kendala.

Hal lain yang dilaporkannya adalah kedalaman dan lebar laut di pelabuhan yang masih terbatas sehingga menghalangi kapal pesiar besar untuk bermanuver. Disamping Pelindo, turut hadir dalam pertemuan itu pejabat terkait dari PT. ASDP, pihak syahbandar dan OPP. (andri/iky) foto: andri/parle/hr

BPBD Diminta Kerja Sama dengan Bimas Kemenag

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama terutama bagian Bimas (Bimbingan Masyarakat) dalam membantu para korban pasca bencana yang mengalami trauma. Langkah ini dinilai lebih efektif daripada merekrut karyawan khusus di bidang ini.

“Saya rasa BPBD bisa bekerjasama dengan bimas-bimas agama. Mereka bisa memberikan kekuatan iman dan menghibur korban bencana yang mengalami trauma,” kata anggota Tim Kunker Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam pertemuan di Kantor BPBD Provinsi Sulut, Manado, Senin (23/2/15).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menawarkan bekerja sama dengan instansi terkait

menurut bisa menekan kebutuhan karyawan atau tenaga pendukung yang diperlukan BPBD pada saat atau pasca bencana. Saraswati menyampaikan hal ini menanggapi laporan BPBD soal kurangnya tenaga pendukung saat bertugas.

Sebelumnya Kepala BPBD Sulut Noldy WD Liow menjelaskan lembaga yang dipimpinnya saat ini masih kekurangan sumber daya manusia. Ia mengaku dalam kondisi tertentu masih menghadapi kendala menyelesaikan tugas dengan 97 orang karyawan apalagi menurutnya Sulut sebagai daerah rawan bencana.

“Sebetulnya BPBD Sulut membutuhkan 140 orang, ternyata setelah kami analisa di BPBD ini dibutuhkan semua personil BPBD disiplin ilmu, karena fungsi kita sebagai koordinasi, fungsi



Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

komando dan fungsi pelaksana,” ujar dia.

Dia menjelaskan BPBD Sulut sekarang didukung pegawai PNS 76 orang, honorer 21 orang dengan tingkat pendidikan S2 11 orang, S1 39, D3 4 dan SMA 24 orang. Menurutnya di-

perluan dukungan SDM tambahan terutama pasca bencana seperti musisi atau seniman untuk menghibur korban terutama anak-anak agar tidak bersedih dan trauma. (iw/iky) foto: iwan armanias/parle/iw

Komisi VIII Dukung Madrasah Konsisten Kurikulum 2013



Tim Kunker Komisi VIII DPR meninjau MAN Model Manado

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Kementerian Agama yang tetap konsisten menerapkan Kurikulum 2013 (K13) pada seluruh Madrasah di Indonesia. Langkah ini dinilai positif karena output dari kurikulum baru tersebut adalah karakter anak didik atau dalam bahasa agama - akhlak.

“Komisi VIII menyampaikan salut kepada Kemenag yang melampaui Kemendikbud yakni masih konsisten untuk menggunakan K13. Kita tahu K-13 agak sulit tetapi pen-

ting karena *basicnya* dan *output* K13 itu adalah pendidikan karakter yang dalam bahasa agama itu adalah pendidikan akhlak,” kata Ketua Tim Kunker Sodik Mudjahid dalam pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenag di Manado, Sulsel, Senin (23/2/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan siapapun yang berjuang untuk pendidikan karakter bangsa patut mendapat apresiasi, walaupun itu sulit. Ia menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang notabene tokoh muda Anies Baswedan kurang tangguh memperjuangkan hal ini.

“Komisi VIII sangat menghargai perjuangan siapapun yang berpartisipasi di dalam pembangunan akhlak. Bicara akhlak pilarnya bukan para ustadz, bukan para pendeta tapi pilarnya adalah guru. Mendikbud yang terdahulu berani, sekarang digantikan dengan yang muda ternyata kalah beraninya,” tandasnya.

Sodik yang juga Wakil Ketua Komisi VIII menyebut sejumlah temuan lapangan di daerah menunjukkan ada kepala dinas yang masih ragu-ragu dalam memilih kurikulum yang akan diterapkan bagi peserta didik. Ia berharap jajaran Kanwil Kemenag di Manado tetap teguh dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah. (iw/iky) foto: iwan armanias/parle/iw

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR menilai sejumlah permasalahan terkait aspek keamanan dan kenyamanan masih perlu diperbaiki manajemen PT Angkasa Pura I yang mengoperasikan Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini penting karena bandara ini cukup sibuk melayani maskapai dari dalam maupun mancanegara.

“Tadi kita masih melihat banyak kerbau di ujung landasan bandara hal itu membahayakan penerbangan. Apalagi Bandara Lombok statusnya sudah bandara internasional, kalau ini disoroti tamu asing atau maskapai penerbangan asing ini hal yang kurang baik,” kata Wakil Ketua Komisi V Muhidin dalam pertemuan di kantor Angkasa Pura I, Mataram, NTB, Selasa (24/2/15).

Bicara pada kesempatan yang sama Ketua Komisi V Fary Djemy Francis juga menyoroti adanya informasi tiga maskapai penerbangan yang belum

Komisi V Kritisi Bandara Internasional Lombok



Tim Kunker Komisi V DPR saat pertemuan dengan AP I Bandar Udara Internasional Lombok

memanfaatkan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ia menekankan aturan soal ini sudah tegas tercantum dalam UU Penerbangan.

“Informasi cuaca harus didistribusikan kepada maskapai penerbangan. Kami mendapatkan informasi ada tiga maskapai penerbangan, belum memanfaatkan informasi cuaca itu yang dikeluarkan BMKG padahal sudah diatur

dalam Undang-Undang Penerbangan,” tandasnya.

Tim Kunker Komisi V ke Provisini NTB juga mengkritisi sejumlah temuan lain seperti keberadaan pedagang asongan yang bebas memasuki kawasan bandara. Hal positif yang mendapat apresiasi anggota dewan adalah akses jalan menuju bandara namun masih perlu dilengkapi dengan rambu-rambu.

Ruas pertama jalan akses menuju

bandara diperkirakan sudah dapat diselesaikan pada tahun ini. Komisi V berkomitmen mendukung anggaran penyelesaian ruas kedua pada APBN 2015. Dalam pertemuan tersebut mengemuka, pemerintah daerah sudah sepakat untuk menganggarkan dana untuk rambu, penerangan dan fasilitas jalan lainnya. *(andri/iky) foto: andri/parle/hr*

Komisi VIII Apresiasi MAN Model Manado

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI mengunjungi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Sekolah yang terpilih menjadi model bersama 35 MAN lain di Indonesia dinilai berhasil menorehkan prestasi di tingkat provinsi bahkan nasional.

Prestasi yang diraih antara lain juara Olimpiade Ekonomi tingkat Nasional 2014, Juara I Olimpiade Matematika dan Fisika Sulut 2007 dan pernah menjuarai Cerdas Cermat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dilaksanakan MPR RI.

Salah satu prestasi lain yang menarik perhatian Tim Kunker yang dipimpin oleh Sodik Mudjahid adalah Gerakan Seribu Rupiah/hari. Program yang didukung oleh siswa, guru, Komite madrasah, orang tua dan masyarakat ini berhasil membangun masjid senilai Rp1,4 miliar.

“MAN Model Manado ini patut menjadi contoh bagi sekolah lain dan ini harus kita dukung,” kata politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini. Tim Kunker berkesempatan me-



Tim Kunker Komisi VIII DPR meninjau pembangunan Masjid di MAN Model Manado

ninjau fasilitas sekolah dan mesjid swadaya di atas lahan seluas 1300 m2, yang dibangun tanpa bantuan anggaran dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah.

Dalam kesempatan itu pula, Komisi VIII menyerahkan bantuan dana yang nantinya akan digunakan untuk menuntaskan pembangunan mesjid. “Mudah-mudahan ini barokah dengan dibangunnya rumah Allah ini,” ujar Sodik mengakhirinya. *(iw/iky) foto: iwan armanias/parle/iw*

Komisi V Terima Aspirasi Korban Banjir Wariori



Tim Kunker Komisi V DPR saat menghadapi unjuk rasa korban banjir Wariori

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat menerima aspirasi masyarakat yang menjadi korban banjir meluapnya sungai Wariori, Kabupaten Manokwari. Dalam kesempatan itu masyarakat mendapat informasi tentang komitmen DPR dalam mendukung program normalisasi sungai.

“Kami sudah mempertimbangkan dukungan anggaran pada APBN sebesar Rp10 miliar untuk program normalisasi Sungai Wariori sehingga banjir tidak berdampak kepada wilayah yang saat ini menjadi pemukiman,” kata Ketua Tim Kunker Michael Wattimena, Senin (23/2/15).

Ia menambahkan program lain yang telah mendapat dukungan dewan adalah pembangunan bendungan yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. “Bendungan Wariori itu adalah proyek yang tersendiri untuk irigasi dan itu pekerjaannya sudah dimulai dari tahun 2013 dan akan berakhir tahun 2016 dengan total anggaran APBN Rp238 milyar,”

tuturnya.

Sementara itu Bupati Manokwari Bastian Salabai yang mendampingi Tim Kunker menjelaskan pemerintah daerah kabupaten telah berusaha maksimal dalam menangani korban bencana. Tetapi ada hal yang menyangkut upaya perbaikan sebagai pencegahan bencana serupa terjadi kembali.

“Inti masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mengalihkan aliran sungai ke aliran aslinya, langkah normalisasi ini baru diupayakan,” ujar Bastian. Ia menambahkan dengan berbagai keterbatasan pihaknya akan melibatkan berbagai instansi untuk dapat menyuplai bantuan terutama bahan makanan kepada masyarakat korban banjir. (ry/iky)
foto: rizka/parle/hr



Tim Kunker Komisi VIII DPR berdialog dengan Gubernur Prov. Sulut

Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) dan para Pemimpin Agama menghendaki agar Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUB) jangan dihapus. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulut Sarundajang saat pertemuan dengan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Minggu (22/2/2015), di ruang VIP Bandara Internasional Sam Ratulangi.

“Badan ini telah memberi sesuatu yang sangat berharga bagi pertumbuhan umat beragama di Sulut dan juga memelihara harmonisasi persatuan dan kesatuan kerukunan antar umat beragama di Sulut,” jelasnya.

Menurut Sarundajang, di Sulut mempunyai kearifan lokal yang sudah dipelihara dan didukung oleh seluruh umat beragama, seperti Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUB).

“Jadi secara inheren ini berjalan bersama-sama walaupun sudah ada kebijakan pemerintah mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),” kata Sarundajang seraya menambahkan BKSAUB lahir sesudah Sulut menyelenggarakan MTQ ke-X.

MTQ ini, lanjutnya, dilaksanakan bersama-sama antara seluruh umat beragama. “Ini unik sekali, Panitia MTQ lebih banyak dari agama Kristen, termasuk saya sendiri pada waktu itu,” tambahnya.

Jadi secara historis BKSAUB itu memang tetap dipelihara

Gubernur Sulut Minta BKSAUB Jangan Dihapus

bahkan sampai di pelosok-pelosok desa yang ada di Sulut. Kalau ada masalah-masalah yang menyangkut keyakinan atau agama, itu yang lebih dahulu menyelesaikan adalah BKSAUB. “Inilah kondisi kehidupan beragama di Sulut yang kita kenal bersama sehingga Sulut menjadi studi banding dalam hal agama,” ujarnya.

Menanggapi keinginan masyarakat Sulut, Ketua Tim Kunker Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan, forum-forum atau badan-badan umat beragama bukannya harus dihapus bahkan akan kita tambahkan. “Justru kita ingin menguatkan forum atau badan kerukunan inter beragama bahkan juga kerukunan antar beragama,” tegasnya.

“Jadi kalau gubernur pernah mendengar itu, saya kira itu tidak benar, BKSAUB akan dihapus, bahkan Komisi VIII akan menambah atau memperkuat forum-forum atau badan kerukunan beragama,” kata Sodik.

Sodik menambahkan, untuk hal ini, sebaiknya gubernur dan masyarakat Sulut tidak perlu khawatir dan jangan pernah ada pikiran semacam itu, karena kita pun tidak punya pemikiran untuk menghapus badan tersebut,” jelas politisi dari Partai Gerindra ini.

Terkait masalah FKUB, Sodik menjelaskan, tidak hanya sebatas pembentukan tapi disitu juga ada program berbasis hasil riset dan fakta dilapangan. Karena di beberapa kota yang mungkin aman, forum itu memang agak kurang berdaya.

“Jadi sekali lagi, apakah daerah yang bermasalah atau tidak, forum itu diberdayakan dengan cara untuk yang kota-kota aman terus menggali masalah-masalah itu untuk mengantisipasi, sedangkan di daerah-daerah yang rawan harus lebih intens lagi. Jadi memecahkan masalah berorientasi pada fakta di lapangan,” kata Sodik. (iw) foto: iwan

armanias/parle/iw

Stadion Teladan Harus Dikelola Dispora, Bukan Dinas Pertamanan

Komisi X mendapatkan temuan, walaupun memiliki Dinas Pemuda dan Olah Raga, namun ternyata sarana

olah raga di Pemerintah Kota Medan, seperti Stadion Teladan ditangani oleh Dinas Pertamanan dan Gelanggang

Olah Raga (GOR) dikelola oleh Dinas Pembangunan.

Menurut Anggota Komisi X Esti



Wijayati dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dilihat dari sisi fungsi pasti salah, karena menyangkut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Stadion Teladan pasti untuk fasilitas olah raga. Dan Pemerintah kota sudah punya Dispora yang mestinya dikelola di tangan yang tepat.

“Stadion Teladan seharusnya dikelola Dispora, bukan di Dinas Pertamanan” ungkap Esti, saat meninjau Stadion Teladan, Medan Senin (23/2).

Esti mengatakan, pemanfaatan stadion untuk olah raga tidak akan maksimal karena pengelolaannya belum sesuai tupoksi, yang kemudian berakibat pada fasilitasnya tidak akan memadai ketika pengelolaannya dilakukan oleh pertamanan.

Hal ini akan berbeda jika pengelo-



Anggota Komisi X DPR Esti Wijayati

laannya dilakukan oleh instansi sesuai bidang tugasnya. Jadi sudah mengerti tujuannya dan mau dibawa kemana serta untuk target apa saja sehingga

harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. “Problemnya lebih kepada pengelolaan sehingga peruntukannya tidak maksimum, ketika pengelolannya tidak jelas,” ujarnya.

Selain itu, kata Esti, juga masih ada permasalahan soal akte kepemilikan atau sertifikat tanah. Dengan belum adanya kejelasan mengenai pengelolaan Stadion Teladan, Komisi X mengkhawatirkan tidak dapat mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memberikan kucuran dana.

“Kalau akan diberikan bantuan lagi harus ada kejelasan pengelolaannya dahulu. Sistem pengelolaan harus sesuai dengan aturan. Fasilitas olah raga dikelola bidang pertamanan pastinya tidak akan maksimal,” ujar Esti Wijayati. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.

DPR Terima Aspirasi Paguyuban Nelayan

DPR RI menerima aspirasi perwakilan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Tegal. Mereka meminta dewan mendukung pencabutan peraturan yang telah dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena dinilai tidak memihak kepada kepentingan nelayan kecil.

Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan mengaku dapat memahami keberatan yang disampaikan perwakilan nelayan tersebut. “Peraturan Menteri sebaiknya setelah melalui pengkajian yang tepat dan pembagian yang jelas antara nelayan perorangan dengan korporasi/perusahaan perikanan, jangan disamaratakan,” katanya dalam pertemuan di lantai 17 ruang rapat Gerindra Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan alat tangkap ikan yang selama ini dimiliki nelayan, sebagian besar merupakan bantuan dari pemerintah yang sekarang dalam Permen no.2/2015 dilarang penggunaannya.

la menyebut pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi sebelum menetapkan satu peraturan, bila perlu beri bantuan untuk alat tangkap yang direkomendasikan pemerintah.

“Jangan serta merta dilarang, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang tentunya akan membawa dampak berkejolakannya para nelayan Indonesia. Mereka menganggap kebijakan ini tidak berpihak kepada mereka tanpa solusi yang jelas. Tentunya kami yang terdiri dari lintas komisi, akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan,” tutur dia.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi IV OO Sutisna mengatakan pemerintah sebaiknya mencabut Permen no.1/2015 tentang Pelarangan Penangkapan dan Perdagangan Lobster, Kepiting dan Rajungan serta Permen no.2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Trawl, dan Pukat Hela.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

“Pemerintah segera menerbitkan Permen yang baru walaupun dalam pelaksanaan Permen baru tersebut memerlukan jeda waktu yang tidak sedikit akan tetapi diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat nelayan paling bawah,” tandasnya.

Ketua Paguyuban Nelayan Tegal Eko Susanto mengatakan sudah melakukan berbagai upaya namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap kukuh memberlakukan Peraturan Menteri tersebut.

“Kami menilai peraturan ini menyebabkan terbukanya pengangguran masal, bahkan menimbulkan kemiskinan bagi para nelayan kecil,” kata dia.

(spy/iky) foto: dok/parle/hr

Komisi X Dukung Sumut Tuan Rumah Cabang Wushu Asian Games

Komisi X DPR dukung rencana penambahan tempat penyelenggaraan Asian Games, untuk cabang olah raga wushu di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Muslim, hal ini merupakan respon Komisi X atas permohonan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugro-



Anggota Komisi X DPR Muslim

ho berkaitan dengan tuan rumah cabang olahraga wushu, di Kantor Gubernur, Senin (23/2), Medan.

Dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X terungkap bahwa Indonesia merupakan tuan rumah kompetisi olahraga 4 tahunan Asian Games yang akan diselenggarakan pada tahun 2018. Untuk tempat penyelenggaraan Asian Games sudah ditetapkan 2 kota yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.

Namun demikian menjadi perhatian Komisi X bahwa wushu merupakan salah satu cabang olahraga yang melahirkan atlet-atlet terbaik dan berprestasi. “Komisi X DPR mendukung Sumut dapat menjadi tuan rumah cabang olahraga sebagai provinsi ke-3, dan akan disampaikan kepada Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga),” ungkap Muslim, dari Dapil Aceh II.

Pada kesempatan ini Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho berharap, ada salah satu cabang olahraga yang bisa dilaksanakan di Sumatera Utara, yaitu cabang olahraga wushu. Pasalnya menurut dia, karena guru besar wushu, baik tingkat nasional maupun Asean adalah warga Sumatera Utara dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perolehan emas dalam ajang nasional, regional maupun internasional.

Masalah ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yang juga sebagai tuan rumah Asean Games. Ia mengutip pernyataan Gubernur Sumsel akan memperjuangkan usulan tersebut.

“Komisi X merupakan mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olah raga, karena itu kami berharap untuk mendukung Medan, Sumut menjadi tuan rumah khusus cabang olahraga wushu dalam Asian Games 2018 mendatang,” ujar Gatot menambahkan. (as), foto: agung/parle/hr

Komisi IX DPR Kunjungi Luwu Timur

Baru kali ini Komisi IX DPR RI berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk melihat dari dekat sekaligus mendengar keluh kesah masyarakatnya di bidang layanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Infrastruktur jalan masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.

Menumpang pesawat kecil dari Bandara Sultan Hasanudin di Makassar, tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri disambut dengan meriah oleh Bupati Luwu Selatan Andi Hatta Marakarma, Senin sore (23/2). Pesawat yang ditumpanginya rombongan merupakan milik PT. Vale Indonesia yang beroperasi di Luwu Timur dengan mengeksplorasi nikel.

Tim Kunker langsung meninjau RS. Inco Soroako milik PT. Vale diantar langsung oleh Bupati Luwu Timur. Pasiennya didominasi para karyawan. Namun, masyarakat umum juga bisa diterima di RS yang memiliki 65 tempat tidur itu. Walau belum menjadi mitra BPJS Kesehatan, RS ini berupaya memberi layanan terbaik bagi masyarakat sekitar. Rencananya Juli mendatang RS. Inco Soroako akan menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Syamsul Bahri kepada para tenaga kesehatan di RS tersebut menghimbau agar RS ini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar yang bukan karyawan perusahaan. Izin RS ini hingga Januari 2016 dengan tipe C. Para tenaga kesehatannya merupakan asli orang Sulawesi Selatan. Sementara itu PT. Vale Indonesia yang beroperasi di Luwu Timur ini, keberadaannya sangat membantu Pemkab dan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Luwu Timur mencapai Rp150 miliar yang hampir semuanya didapat dari operasi-



Tim Kunker Komis IX saat mengunjungi sebuah rumah sakit di Luwu Timur

nal PT. Vale. Pemerintah setempat tidak memungut retribusi lagi dari usaha rakyat seperti pasar untuk meningkatkan PAD. Usai meninjau RS. Inco, tim Kunker Komisi IX DPR langsung mengadakan pertemuan di Kantor Bupati Luwu Timur. Selain tokoh masyarakat setempat, hadir pula SKPD dan DPRD.

Syamsul menyampaikan, kunjungan ini untuk melihat fakta dan informasi secara konkrit, apakah UU yang dirancang DPR berjalan baik di daerah. Sementara anggota Komisi IX yang turut serta mengunjungi Luwu Timur adalah Andi Fauziah Pijiwatie Hatta, Siti Masrifah, Hamid Noor Yasin, Daniel Lumban Tobing, dan Djoni Rolindrawan. Perjalanan ke Luwu Timur ditempuh selama satu jam dengan pesawat dari Makassar. (mh) foto: husen/parle/hr

Komisi XI Himpun Masukan Target-target Pembangunan Daerah

Berbagai aturan administratif dari pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan daerah menjadi bahan diskusi dan perhatian khusus dalam pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beserta jajarannya, Kemenkeu Provinsi DIY, BPS, BPK dan BPKP Provinsi DIY, Senin (23/2).

Pada kesempatan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan kekhawatirannya akan timbulnya temuan BPK jika dalam melaksanakan program pembangunan daerah tidak mengacu pada aturan pemerintah pusat.

“Kalau saya ingin mengalokasikan dana untuk menambah honor guru PAUD yang saat ini tidak proporsional (hanya 50-150 ribu), apakah tidak jadi masalah? Bagaimana caranya kami membantu agar itu tidak menjadi temuan?” tanya Sri Sultan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mendapatkan data dan informasi terkini terkait target-target pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas-tugas jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DIY.



Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu

“Apa yang menjadi persoalan di daerah akan kami akomodir dan diteruskan ke pemerintah pusat untuk dicari jalan keluarnya yg terbaik,” ujar Gus Irawan.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, bahwa Kunjungan Kerja tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan dan mengawal program dan kebijakan pemerintah sesuai UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.

“Dalam APBN-P 2015 Komisi XI konsisten menaikkan alokasi anggaran ke semua mitra kerja, ini komitmen kami dalam mendukung menyukseskan program Nawacita pemerintah Jokowi-JK,” ungkap Gus Irawan.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut jajaran Kementerian Keuangan Provinsi DIY antara lain Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara.

Tim Kunker Komisi XI dipimpin Gus Irawan Pasaribu dengan anggota : Jon Erizal, Muhammad Prakosa, I.G.A Rai Wirajaya, Hendrawan Supratikno, Michael Jeno, Edison Betaubun, Ahmad Noor Supit, Wilgo Zainar, Rudi Hartono Bangun, Anna Mu'awanah, Ecky Awal Mucharam, Amir Uskara, Jhonny G. Plate, Ahmad Sahroni. (oji) foto: naefurodji/parle/hr

Komisi VI Hadirkan Tiga Dirut BUMN Kunjungi Sumsel

Guna mempercepat pembangunan dan dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah Asian Games ke-18, Tim Komisi VI DPR dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan menghadirkan tiga Dirut BUMN dan Deputi Kementerian BUMN. Kunker spesifik baru-baru ini dipimpin Wakil Ketua Dodi Reza Alex Noerdin didampingi Ketua Achmad Hafisz Tohir bersama 10 anggota Dewan lintas fraksi menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN pasca pemberian PNM.

Keempat pejabat teras tersebut adalah Dirut PT KAI Edy Sukmono, Dirut PT Utama Karya I Gusti Ngurah Putra, Dirut PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi dan Deputi Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa-jasa lainnya Kementerian BUMN Gatot Trihargo.

Selain ke Sumsel, Tim Komisi VI juga mengirim Tim ke Sumatera Utara, Bali dan Jawa Timur. Ketua Komisi VI Hafisz Tohir mengatakan, kunker ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian Dewan kepada pembangunan di Sumsel yang dilakukan sejumlah BUMN yang baru saja menerima penyertaan modal negara (PMN).

Dalam waktu dekat provinsi ini akan membangun jalan



Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR saat pertemuan dengan Gubernur Sumsel dan jajarannya

tol Palembang-Indralaya (Palindra), perluasan bandara Sultan Mahmud Badarudin (SMB) dan pembangunan jalur kereta api double track. Sudah sekitar 63 tahun jalur kereta ini masih single track, maka akan segera dibangun dua jalur. “Diharapkan program-program Sumsel dapat berjalan berkesinambungan dengan pembangunan pusat dan berjalan dengan baik,” harapnya.

Dodi Reza mengatakan, Indonesia akan kembali menjadi

tuan rumah Asean Games 2018, setelah AG yang pertama di Jakarta tahun 1963 pada era Presiden Soekarno. Kini giliran Jakarta dan Palembang menjadi tuan rumah, karena itu yang paling penting adalah kesiapan infrastruktur yang nanti akan dibangun.

“Semua pihak diharapkan mendukung Sumsel, bukan hanya sebagai tuan rumah AG, tetapi merupakan kesatuan program-program infrastruktur yang akan dibangun, termasuk didalamnya tol Trans Sumatera dan Trans Sumatera Real Way yang telah dicanangkan pemerintah ke depan,” katanya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada kesempatan menjelaskan, menjadi tuan rumah Asian Games ke 18, akan dibuka tanggal 18 bulan 8 tahun 2018. “Ini angka hoki, two guest city Jakarta yang pernah menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962 dan Palembang pernah menjadi tuan rumah Sea Games,” katanya.

Komisi IX Peroleh Temuan Penting di Kalbe Farma

Kunjungan investigasi Komisi IX DPR RI ke PT Kalbe Farma produsen obat anestesi Buvanest Spinal dengan nomor batch 630077, berhasil memperoleh sejumlah temuan penting. Hal tersebut akan menjadi catatan sebelum komisi yang membidangi masalah kesehatan ini dapat mengurai persoalan dibalik meninggalnya dua pasien di RS Siloam Tangerang setelah diinjeksi obat ini.

“Masih terlalu dini untuk menentukan siapa yang bersalah atas peristiwa meninggalnya dua pasien RS. Siloam, Karawaci. Namun Kami punya temuan, catatan-catatan penting yang kami dapatkan dari investigasi langsung kami hari ini ke PT Kalbe Farma,” jelas anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka usai kunjungan di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/1/15).

Politisi F-PDI Perjuangan ini mengungkapkan penarikan Buvanest Spinal 4 ml dari pasaran bukan menjadi bukti adanya masalah atau kesalahan di pihak produsen. Ada dugaan *Buvanest Spinal 4 ml Mixed up* (tercampur atau tertukar) dengan asam traneksamat yang merupakan injeksi untuk mengurangi pendarahan, namun dia tidak ingin menduga-duga atau berasumsi dalam menangani kasus tersebut, perlu pendalaman lebih lanjut.

Terkait dengan sudah ditariknyanya batch Buvanest Spinal dan dua batch asam traneksamat dari peredaran di seluruh Indonesia oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Rieke mengatakan hal itu bukan menjadi sebuah jawaban siapa yang bersalah atas kasus tersebut.

“Saya tidak ingin menduga-duga atau berasumsi atas

Komisi IX Lakukan Investigasi ke PT Kalbe Farma

Menurut Alex Noerdin, menjadi tuan rumah itu mengemban tugas negara, membela nama baik bangsa dan negara, sehingga kalau bisa melaksanakan dengan baik nama republik terangkat. Karena itu semua berkewajiban untuk mensukseskan program ini dan wajib untuk membela RI. “Bukan hanya untuk Sumsel tetapi untuk negara dan bangsa ini,” ujarnya.

Ditambahkan Dodi, sebanyak 14 ribu atlet akan datang bersamaan, kemudian *official* dan pengunjung lain sehingga pertumbuhan penumpang juga akan meningkat. “Kami minta segera kepada AP II untuk mengantisipasi kapasitas Bandara SMB II, sejalan dengan tekad pemerintah untuk membenahi Bandara Soekarno-Hatta, Kualanamu Medan, juga bandara lain untuk membuat nyaman, aman dan pelayanan ramah bagi seluruh penumpang,” pungkask dia. (mp), foto: *mastur prantonoparle/hr*



Sidak Komisi IX DPR ke PT Kalbe Farma, Cikarang

kasus ini. Sejauh ini kami juga belum menerima laporan resmi dari BPOM, namun jika kemudian ada penarikan larutan injeksi Buvanest Spinal 4ml dari pasaran hal itu bukan serta merta ada masalah di injeksi Buvanest Spinal 4 ml, itu bagian dari SOP. Mohon kesabaran dari semua pihak untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini,” ungkapnya.

Rieke menjelaskan sudah menjadi SOP (*Standard Operating Procedure*) kalau sebuah obat atau injeksi diduga menimbulkan sesuatu yang berisiko tinggi, itu memang harus dihentikan terlebih dahulu produksinya, ditarik kembali produksinya untuk sementara waktu guna diteliti dan ditinjau lebih jauh lagi akar permasalahannya. (Ayu) foto: *iwan armanias/parole/hr*

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan investigasi ke PT Kalbe Farma produsen obat anestesi Buvanest Spinal yang diduga menjadi penyebab meninggalnya dua pasien Rumah Sakit (RS) Siloam Karawaci, Tangerang. Kegiatan yang dilakukan dalam masa reses ini, untuk mencari jawaban tentang kemungkinan kesalahan produksi.

“Kami ingin mendapat gambaran sekilas tentang proses produksi Injeksi Buvanest Spinal 4 ml, tentang bagaimana proses produksinya dan tentang kemungkinan adanya kesalahan produksi yang dilakukan Produsen Injeksi tersebut. Hasil dari investigasi ini akan dialami lagi dalam Panja (Pantia Kerja),” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Pius Lustrilang saat kunjungan di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/2/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan Panja yang akan bekerja pada masa sidang berikutnya akan mencari akar permasalahan kasus ini dengan harapan kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa akan datang.

DPR menurutnya akan memastikan langkah pemerintah optimal dalam menangani kasus ini sehingga masyarakat dapat terlindungi dari ke-



Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilang

mungkinan-kemungkinan terulangnya peristiwa serupa.

“Salah satu tugas kami melakukan

pengawasan, jadi investigasi kami ini sebagai langkah mengawasi penyelidikan yang dilakukan BPOM, Kemenkes dan oleh PT Kalbe Farma sendiri. Dari hasil investigasi yang akan dilanjutkan dalam Panja nantinya yang akan ditemukan siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas kasus ini,” papar wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT I ini.

Jika kemudian telah diketahui siapa yang bersalah atas kasus ini, maka menurut Pius sesuai aturan yang berlaku setiap kesalahan atau pelanggaran harus diikuti oleh pemberian sanksinya.

“Sanksinya apa, nanti akan kita dalam terlebih dahulu kasus ini. Ini masih awal investigasi. Namun pasti akan ada pemberian sanksi, dan harus ada yang bertanggung jawab atas kasus ini,” tegasnya. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/iw

Komisi IX DPR Investigasi Kasus Obat Anestesi

Tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Siloam, guna melakukan mendapatkan informasi mengenai penggunaan obat anestesi yang mengakibatkan dunia.

“Masalah ini sangat krusial untuk bisa dipertanggungjawabkan ke depannya terhadap servis yang dilakukan oleh rumah sakit, tidak hanya RS. Siloam. Kondisi akan berbahaya jika tidak dilakukan investigasi yang benar,” ungkap Anggota Komisi IX Irma Suryani (F-Nasdem), usai bertemu dengan Direksi RS. Siloam, di Karawaci, Tangerang, Jumat (20/2).

Ikut dalam Tim Komisi IX adalah Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Robert Rouw (F-Gerindra), Amelia Anggraini (F-Nasdem), Ayub Khan (F-PD), Ali Taher (F-PAN), dan Andi Fauziah Pujiwati Hatta (F-Golkar).

Irma Suryani, mengungkapkan Komisi IX melakukan pendalaman kasus ini, agar tidak terjebak dalam penafsiran yang salah, karena kasus ini belum selesai dan masih dalam investigasi. Hal itu penting agar masyarakat bisa aman ke rumah sakit tanpa takut akan kesalahan-kesalahan seperti ini.

“Pendalaman ini dibutuhkan agar diketahui sebenarnya akar permasalahannya, dan solusi yang harus dilakukan selanjutnya, karena masyarakat Indonesia sekarang menunggu apakah RS ini aman bagi masyarakat,” kata Irma.

Ia menyatakan, Komisi IX tidak menyatakan bahwa RS. Siloam yang salah atau PT. Kalbe Farma yang salah, sebelum ada investigasi final. Oleh karena itu Komisi IX hadir untuk berdiskusi dengan direksi RS. Siloam dan melihat langsung dan ingin mengetahui SOP yang dilaksanakan.

“Komisi IX Ingin mengetahui prosedur yang dilakukan oleh para dokter pada saat melakukan operasi atau tindakan-tindakan yang akan berakibat fatal, dan ingin mengetahui SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku di RS ini se-



Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz dan Irma Suryani saat diwawancara wartawan

hingga kami dapat mengetahui keputusan yang akan diambil terkait kasus yang terjadi di RS ini,” tegas dia.

Hal senada disampaikan, anggota Komisi IX lainnya. Ali Taher Parasong, kedatangannya dimaksudkan untuk mencari informasi tentang permasalahan yang muncul di RS. Siloam atas wafatnya 2 pasien ketika operasi yang menggunakan Buvanest Spinal. “Persoalan sedang kami kaji dan dalam upaya ada kejelasan terkait dengan penggunaan obat tersebut,” katanya.

Ali Taher menjelaskan yang menjadi persoalan sekarang ini adalah Buvanest Spinal yang 4 ml yang biasa digunakan tetapi ternyata dalam tindakan terhadap 2 pasien itu Buvanest Spinal digunakan adalah 5 ml.

“Ini yang sedang kita cari, kenapa tiba-tiba hal itu diluar

standar, karena standar internasional adalah 4 ml, dan yang 4 ml itulah yang diproduksi oleh PT. Kalbe Farma yang kemudian digunakan oleh rumah sakit. Persoalannya adalah

kenapa ada 5 ml yang keluar di situ. Nah ini sedang kita jajaki. Apakah ini kesalahan dan kelalaian rumah sakit atau kelalaian produksi di pabrik,” tegas Ali Taher. (as) foto: naefurodji/parle/hr

Komisi VI DPR Dorong Perbaikan Manajemen Dok Perkapalan Surabaya

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR mendorong perbaikan manajemen Dok Perkapalan Surabaya (Persero) sehingga kinerja finansial BUMN tersebut dapat semakin membaik.

“Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Dok dan perkapalan Surabaya (Persero) itu sebesar Rp. 200 Miliar dan keputusan pemberian PMN itu dengan catatan tidak untuk membayar hutang,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Azman Natawijana kepada Parlemen, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemberian PMN itu juga memprioritaskan penuntasan hasil laporan BPK yang harus dijalankan oleh PT Dok Perkapalan Surabaya. “Parlemen mengharapkan pemberian PMN ini dapat membangkitkan Dok perkapalan Surabaya sesuai dengan program pemerintah,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah dan DPR mendorong revitalisasi usaha dok perkapalan di Indonesia. “Permasalahan dok ini bukan soal order semata tetapi persoalan yang berbelit-belit yaitu regulasi, dan pembelian barang yang terkena PPN dan bea masuk yang membuat produknya kurang bersaing,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, juga terjadi persoalan salah hitung atau miss management di PT PAL, dan Dok Surabaya. “Hal itu terkait pembuatan kapal dan profesionalitas. Keempat yaitu, permasalahan internal di tubuh perusahaan tersebut,” paparnya.

Dia menambahkan, Parlemen dorong peningkatan profesionalisme manajemen dalam perseroan. “Kita akan mene-



Tim Kunker Komisi VI DPR saat meninjau PT PAL dan Dok Surabaya

lusi aset negara yang dilindungi oleh negara di setiap BUMN. Para direksi dan eselon I kalau ada yang melenceng itu diingatkan bahwa kita ada UU Aset Negara,” paparnya.

Dia mengatakan, Komisi VI DPR akan mengundang seluruh BUMN yang mendapatkan PMN. “Para Direksi harus menjelaskan S Curver projectnya, karena itu saat ini Tim Panja Pengawasan Penyertaan Modal negara sudah berjalan sekarang ini,” katanya. (sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.

DPR Harus Dorong Pemerintah Tingkatkan Anggaran Kesehatan



Peneliti Kebijakan Publik Ah Maftuchan dan Karo Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Satyanto Priambodo

Dewan Perwakilan Rakyat, melalui fungsi anggarannya harus mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan ang-

garan kesehatan sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besaran alokasi anggaran itu pun harus diluar gaji tenaga medis.

Demikian diungkapkan oleh Peneliti Kebijakan Publik Lembaga Prakarsa, Ah Maftuchan, dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI. Diskusi mengambil tema “Anggaran Kesehatan dan Capaian Pembangunan Kesehatan”.

“DPR juga perlu mengawasi alokasi bidang kesehatan lebih rajin dan lebih mendalam, sehingga nantinya bidang kesehatan benar-benar diberikan alokasi anggaran 5 persen dari APBN itu lebih efektif dan bisa dipertanggung jawabkan untuk menjadi alat mewujudkan visi misi kita untuk bidang kesehatan,” kata Maftuchan, dari Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Rabu (25/02/15).

Sebagaimana diketahui, Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan, Pemerintah

mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5 persen di luar gaji. Namun hingga kini, anggaran kesehatan belum mencapai apa yang telah diamanatkan UU. Anggaran kesehatan masih berada di kisaran 2,3-2,5 persen APBN.

“Dari 2009 saat UU itu diterbitkan sampai sekarang, kita belum bisa jalankan amanat UU itu. Artinya ini menunjukkan bukan semata-mata kemampuan fiskal kita yang sempit, tapi komitmen politik yang juga rendah. Saya melihat komitmen itu belum kuat sehingga tidak ada tahapan atau roadmap, kapan anggaran 5 persen itu akan dipenuhi,” nilai Maftuchan.

Ia berharap, ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk membuat roadmap mencapai anggaran 5 persen dari APBN. Misalkan, dari tahun 2010 sampai 2015 ada kenaikan anggaran beberapa persen, sehingga pada tahun 2015 dapat mencapai 5 persen. Untuk pemerintahan baru ini, ia meminta komitmen ini dapat dilaksanakan.

“Alasan utama tidak dapat memenuhi bukan karena tidak ada anggaran. Tapi lebih tidak adanya komitmen. Kita minta pemerintahan baru ini menunjukkan komitmen itu. Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah harus mampu menyusun tahapan-tahapan untuk sampai ke anggaran 5 persen. Walaupun di tahun 2019 tidak terpenuhi, tetapi ada tahapan-tahapan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain itu, Maftuchan menekankan, DPR juga harus me-

maksimalkan fungsi pengawasan dan legislasi, serta sepatutnya dengan Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN.

Ditemui usai acara, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Setjen DPR RI, Satyanto Priambodo menyatakan, dipilihnya tema anggaran kesehatan ini yakni untuk menambah referensi kepada para analis dalam menyusun buku analisa anggaran kesehatan. Saat ini, buku itu dalam tahap penyusunan, dan direncanakan, akan dilakukan finishing di pekan kedua Maret 2015.

“Kita ingin mendapatkan referensi-referensi dan masukan dari berbagai arah, sehingga kami memiliki referensi yang komprehensif, dan bisa dimanfaatkan oleh Anggota Dewan. Sekaligus, sebagai referensi buku anggaran kesehatan yang sedang kami susun saat ini,” jelas Nanang, panggilan akrab Satyanto.

Ia mencatat, jika ingin menjadikan masyarakat Indonesia sehat, harus ada akselerasi, salah satunya dengan memberikan anggaran yang sesuai dengan UU. Mengingat, ini merupakan hak warga negara untuk mendapat kesehatan lahir dan batin.

Selain diikuti oleh para analis di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, diskusi ini juga diikuti oleh peneliti dan tenaga ahli, baik tenaga ahli Anggota Dewan, maupun Komisi. (sf,ss) foto: sofyan/parle/hr

Indonesia Harus Segera Bangun Kilang Minyak Baru



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, yang menyebabkan harga subsidi minyak tinggi adalah masalah kilang di Indonesia tidak siap. Akibatnya kita membeli minyak bensin dan solar dari Singapura.

Hal itu dikatakannya sehubungan tawaran Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat menerima kunjungan Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR belum lama ini. Menurut poli-

tisi PAN asal Dapil I Sumsel ini, saat ini kilang kita tidak sesuai lagi dengan rumusan yang kita keluarkan yakni untuk jenis Ron 88, sementara kita memakai Ron 92.

Karena itu lanjut dia, Indonesia harus membangun kilang baru yang spesifik bernafaskan Ron 92, bukan Ron 88 karena jenis ini hanya satu-satunya digunakan di Indonesia. Kalau terus membeli dari Singapura yang juga memproduksi jenis Ron 92 sehingga subsidi terlalu tinggi, sementara bensin di Singapura sudah sama dengan di Indonesia. “Jadi mau nggak mau harus membangun kilang,” ujar Hafisz menegaskan.

Terkait dengan tawaran Gubernur Sumatera Selatan yang akan menyiapkan lahan dan pelabuhannya di Tanjung Api-api, kata Hafisz, itu menunjukkan komitmen Sumsel untuk membangun kilang yang juga dicanangkan pemerintah.

Sedangkan mengenai investor yang akan membiayai proyek pembangunan kilang tersebut, hal itu menjadi tugas Pertamina. Gubernur tidak berpikir

investasi pengilangannya, sebab menjadi wilayah Pertamina dan masalah itu akan dibahas dengan Komisi VI DPR apakah bisa membangun dengan modal sendiri atau pinjaman ataupun Penyertaan Modal Negara (PMN). “Intinya masalah itu akan kita kaji lebih lanjut oleh Komisi VI,” ungkap Hafisz.

Berdasarkan informasi, Indonesia perlu memiliki 2 kilang minyak baru untuk mengatasi defisit BBM 608.000 barel per hari. Kapasitas kilang Indonesia saat ini mencapai 1,157 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 barel per hari. Di sisi lain, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,257 juta barel per hari.

Pada tahun 2015 ini, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,167 juta barel per hari, produksi minyak yang bisa diolah sebesar 719.000 barel per hari. Kebutuhan BBM diperkirakan 1,359 juta barel per hari, sehingga terjadi defisit 640.000 barel per hari. (mp), foto: mastur prantono/parle/hr.

Revisi UU KUHP, DPR Tunggu Naskah Akademik Pemerintah

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan jika DPR RI masih menunggu naskah akademik revisi UU KUHP dari pemerintah, yang akan mulai dibahas pada masa sidang III bulan Maret 2015 mendatang.

DPR belum tahu apakah revisi UU KUHP itu akan dilakukan secara kodifikasi, modifikasi, bertahap atau tidak. Karena melalui naskah akademik itulah sebuah revisi bisa mulai dilakukan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu.

“Jadi, DPR belum menerima naskah akademik dari pemerintah untuk revisi UU KUHP itu. Sebab, hanya melalui naskah akademik itulah, kita akan mulai mengkaji dan mempelajari untuk pembahasan lebih lanjut. Semoga saja pemerintah sesuai waktu yang ditetapkan, agar pembahasannya bisa segera dimulai,” tegas Aziz dalam diskusi forum legislasi ‘Revisi UU KUHP dan Urgensi Penegakan Hukum’ bersama pakar hukum pidana UI Akhyar Salmi dan Anggota dari ICJR (*Institute Criminal Justice Reform*) di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Sementara menurut Akhyar Salmi, dalam menyusun UU itu perlu konsistensi termasuk apakah dilakukan secara bertahap, modifikasi, membongkar total atau kodifikasi.

“KUHP kita ini masih banyak yang *copy paste*, photo copian dari KUHP produk lama, yang sudah waktunya disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Misalnya terkait pencucian uang, korupsi, terorisme dan sebagainya semua menjadi satu. Juga sanksi yang dijatuhkan ada denda dan penjara, ini melanggar azas-azas hukum yang tak boleh dijatuhkan kedua-duanya,” ujarnya.

Seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu termasuk kekhususan atau *lex specialis*, sehingga harus mempunyai penyidik sendiri dan bukannya dari kepolisian atau lembaga hukum yang lain.

“Hukum pidana itu harus obyektif materiil formil terkait siapa dan perbuatan apa yang bisa dipidana? Apalagi selama ini koruptor lebih memilih dipenjara daripada mengembalikan uang negara,” jelas Akhyar.

Akhyar Salmi menegaskan jika UU KPK itu harus menekankan pada hukum pokoknya, yaitu mengembalikan uang negara dan bukan hukuman penjaranya. “Kalau penjaranya, nanti mendapat remisi, bahkan dengan uang para koruptor itu bisa keluar bebas nonton golf, berlibur sampai keluar negeri dan sebagainya. Jadi, kalau kita serius, menjadikan hukuman penjara itu diganti dengan uang,” tambahnya.

Dengan begitu, kalau nantinya koruptor tersebut tidak mampu membayar kerugian negara yang dikorupsi itu, maka kata Akhyar Salmi, dia harus ditanggung oleh anak keturunannya sampai lunas. “Tapi, yang baru dari KUHP yang sudah lama dibahas oleh DPR RI itu hanya mengenai santet, kumpul-kebo, dan pornografi,” pungkas Akhyar.

Berbeda dengan Akhyar, Anggota dari ICJR menyatakan pesimis DPR akan mampu menyelesaikan 760 pasal KUHP



Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dalam acara Forum Legislasi

yang akan dibahas. Bahkan selama 5 tahun pun tak akan selesai. Untuk itu, jangan berharap ada sesuatu yang baru dari KUHP ini, karena dalam merevisi UU itu tidak dimulai dengan paradigma hukum itu sendiri. “Jadi, tak ada KUHP versi Indonesia, kecuali Perancis, dilanjutkan oleh Belanda dan kemudian ke Indonesia. Maka ide merombak total KUHP itu mustahil,” ungkapnya.

Karena itu revisi atau pembaruan KUHP itu bisa dilakukan secara bertahap dengan melakukan langkah-langkah; Pertama, yaitu mengevaluasi menyeluruh delik-delik dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah tidak tepat dalam situasi masyarakat saat ini, atau tidak sesuai lagi untuk dinyatakan sebagai kejahatan, sehingga perlu dilakukan dekriminalisasi.

Kedua, melakukan kajian yang komprehensif untuk memasukkan perbuatan yang memang mengharuskan untuk dikategorikan sebagai kejahatan, khususnya yang terkait dengan kejahatan kontemporer karena perkembangan zaman atau teknologi. Misalnya kejahatan pencucian uang, kejahatan dunia maya atau sosial media, dan sebagainya.

Ketiga, selain yang terkait dengan kemajuan zaman dan teknologi, unsur-unsur lainnya adalah yang terkait dengan perkembangan kejahatan-kejahatan internasional, yang sudah diakui sebagai kejahatan untuk dimasukkan sebagai kejahatan dalam hukum nasional. Dalam hal ini misalnya kejahatan penghilangan paksa, penyiksaan, dan kejahatan serius lainnya, yang sudah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Keempat, memasukkan tindak pidana yang ada dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan khusus ke dalam KUHP melalui UU. Model-model revisi bisa merujuk pada revisi yang sudah pernah ada atau pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Misalnya Perppu No.16 tahun 1960, UU No.1/PNPS/1965, UU No.4 tahun 1976 dan UU No.27 tahun 1999 dan lain-lain. (sc), foto : eka hindra/parle/hr.



Pemerintah Harus Jelaskan Fungsi PMN



Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR Setyanta Nugraha

“Jumlah PMN saya kira sangat besar. Baru kali ini, dalam sejarah APBN, pemberian PMN terbesar. Ini menjadi isu menarik yang perlu didiskusikan. Supaya kita, para analis ini tidak teralalu ketinggalan dan asimetri informasi dengan eksekutif dan legislatif. Sehingga nantinya ada satu kesamaan dalam pembahasan,” kata Totok, panggilan akrab Setyanta.

Diskusi ini diikuti oleh seluruh jajaran analis di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Ahli, tenaga ahli Anggota DPR dan Komisi, serta para peneliti di lingkungan Setjen DPR. (sf,ds,hi) foto: naefurodji/parle/hr

Pemerintah harus dapat menjelaskan fungsi dana Penyertaan Modal Negara (pmn) yang diajukan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara – Perubahan (APBN-P) 2015. Selama ini, pemerintah dinilai kurang dapat menjelaskan dampak dari PMN yang diberikan oleh negara kepada Badan Usaha Milik Negara.

Demikian dikatakan pengamat BUMN Muhammad Said Didu, dalam diskusi yang diadakan oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI, bertajuk Perkembangan BUMN dan Anak Perusahaannya. Diskusi berlangsung di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Senin (23/02/15).

“Menurut saya, filosofi dari PMN itu sendiri kurang dijelaskan oleh Pemerintah. Belum ada penjelasan kenapa dia minta PMN dan minta berapa. Harus diberikan pemahaman betul tentang manfaatnya PMN. Termasuk

dampak dari PMN tersebut terhadap pembangunan BUMN itu sendiri,” kata Said.

Selain itu, tambah Said, dampak eksternal BUMN setelah diberikan PMN juga perlu mendapat perhatian. Diharapkan, dari PMN ini salah satunya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberikan lapangan kerja.

“Yang perlu diperhatikan juga, bagaimana sasaran dan dampak eksternalitas PMN, bukan dampak PMN terhadap BUMN itu sendiri. Padahal yang dibutuhkan adalah dampak eksternalitas,” imbuh Said.

Ditemui usai acara, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR Setyanta Nugraha menyatakan, pengambilan tema BUMN ini karena pekan lalu DPR baru saja mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara–Perubahan 2015, dimana didalamnya terdapat dana PMN untuk beberapa BUMN.



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad

Komisi XI DPR RI mengapresiasi semangat APBN-P 2015 yaitu melakukan koreksi total atas model belanja pemerintah di tahun-tahun sebelumnya. Fokus belanja pemerintah pada lima program unggulan atau prioritas yang membutuhkan lingkungan ekonomi dan politik yang kondusif.

Lima program unggulan tersebut; Kedaulatan pangan, energi & kelistrikan, kemaritiman & pariwisata, industri; Pelayanan kewajiban dasar oleh negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan; Pengurangan kesenjangan struktural dan regional; Pembangunan infrastruktur konekti-

DPR Kawal Target Pembangunan

vititas dan program unggulan lain yang sepenuhnya didukung oleh DPR.

“Terkait penetapan asumsi ekonomi makro, Komisi XI dengan Pemerintah telah membuat tonggak sejarah penting yaitu ditetapkannya target pembangunan yang terukur dan memiliki visi keadilan sosial. Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator kualitas kinerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” kata Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, dalam rilisnya kepada awak media, beberapa waktu yang lalu.

Gini Rasio dan IPM, tambah Politisi Golkar ini, menjadi penting sebagai indikator keberhasilan pembangunan karena berdasarkan data historis selama sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan Gini Rasio yang sangat signifikan pada tahun 2005 masih sebesar 0,363 pada tahun 2013 sudah mencapai 0,413.

“Ini adalah isyarat ketimpangan

semakin memburuk. Oleh karena itu, Komisi XI berkomitmen terhadap tercapainya target pembangunan yang berkualitas dengan menempatkan empat indikator target pembangunan,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Gorontalo ini menjelaskan, target pembangunan dipengaruhi oleh salah satunya Perluasan Pendapatan Negara dan Penyertaan Modal Negara. Perluasan pendapatan Negara memungkinkan pemerintah mempunyai ruang fiskal yang besar sehingga mampu melaksanakan semua program kegiatan. Penyertaan Modal Negara dapat diberikan kepada BUMN, jika BUMN tersebut mempunyai keterkaitan dengan lima program prioritas pemerintah, yang diharapkan mampu berkontribusi pada pencapaian target pemerintah.

“Seharusnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kepada BUMN adalah mewujudkan program-program prioritas yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas

sebagaimana dinyatakan dalam target pembangunan yang ditetapkan dalam RAPBN-P 2015 berupa penurunan gini rasio, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan

IPM,” jelas Fadel.

Itulah sebabnya, kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini usaha memberikan PMN kepada BUMN yang berada di koordinasi kementerian yang

menjadi mitra kerja Komisi XI harus dievaluasi secara cermat dan hati-hati berdasarkan tujuan, aktivitas BUMN dan kinerja BUMN tersebut selama ini. (sf) foto: naefurodji/parle/hr

Pemerintah Tidak Tegas Tangani Kasus Lion Air

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan Mengatakan, pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan lambat dan terkesan kurang tegas dalam menangani penyelesaian masalah Lion Air, sehingga membuat penumpang terlantar dan terlunta-lunta karena ketidakpastian informasi.

Heri Gunawan mengemukakan, kalau terbukti ada kesalahan prosedur di Lion Air, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan harus segera mengambil langkah tegas kepada Lion Air. “Pemerintah harus segera memerintahkan Lion Air melaksanakan kewajibannya kepada penumpang,” demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Senin, (23/2) siang.

Sebelumnya, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengatakan, sewaktu kasus Air Asia, Menteri Perhubungan cepat sekali merespon kasus itu, dengan segera membekukan rute penerbangan Surabaya-Singapura milik Air Asia.

Akan tetapi, lanjutnya, untuk kasus Lion Air agak lambat, karena itu, dirinya meminta jangan sampai ada kesan adanya perlakuan khusus pada operator.

“Harus ada ketegasan, karena seluruh operator punya hak dan kewajiban yang sama sesuai peraturan Perundang-Undangan dan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Dia menegaskan kembali, terkait pembayaran biaya talangan (pengembalian tiket, dan lain sebagainya) oleh PT Angkasa Pura II harus disikapi secara hati-hati. karena Tupoksi PT Angkasa Pura II bukan untuk handle kewajiban operator yang melanggar prosedur seperti Lion Air. “Jangan sampai itu memperkuat kesan perlakuan khusus pada operator tertentu. Selain itu, pemerintah harus tegas pada semua operator sekaligus melindungi kepentingan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

semua operator,” terangnya kepada Parlemen.

Dia menjelaskan, bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bab I ketentuan umum, pasal 5 ayat 3 bahwa Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar (AD) BUMN, dan peraturan perundangan.

Jadi, lanjutnya, mengenai meminjamkan uang tersebut telah diatur di Anggaran dasar yang harus diputuskan didalam RUPS. “Walau sekecil apapun itu harus di RUPS, karena ini uang Negara sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka, karena AP II menalangi ke Lion Air pasti tidak melalui RUPS maka dianggap melanggar Anggaran dasar,” untkannya.

Menurutnya, yang lebih fatal lagi adalah Angkasa Pura II telah melanggar UU No. 19 tahun 2003 Bab I Ketentuan umum pasal 5 ayat 3.

Dia menambahkan, kasus Lion Air ini harus jadi pelajaran, bahwa adanya penanganan yang kurang tegas berakibat kacau sistem yang ada. “Semua menjadi kacau, termasuk PT Angkasa Pura II juga kacau karena harus melakukan sesuatu yang bukan tupoksinya,” jelasnya.

Padahal, ada banyak pekerjaan rumah PT Angkasa Pura II yang belum selesai, termasuk peningkatan keamanan dan kenyamanan bandara. “Lagi-lagi jangan sampai ada muncul kesan PT Angkasa Pura II bisa dengan cepat menghadirkan uang 4 milyar untuk menalangi biaya pengembalian tiket yang seharusnya adalah kewajiban Lion Air, sedangkan menertibkan pungutan liar, seperti taksi gelap dan lain-lain termasuk lambat sekali. Seharusnya itu menjadi tupoksinya Angkasa Pura II,” tegasnya. (Spy), foto: dok/parle/hr.

Industri Gula Nasional Harus Diproteksi Pemerintah

Anggota Komisi VI DPR Abdul Wachid dari Fraksi Gerindra mengatakan, industri gula dalam negeri belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean AEC/AFTA karena itu, diperlukan sinergisitas antar kementerian untuk mempersiapkan industri gula dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

“Untuk MEA atau AFTA sebenarnya sudah dicanangkan sudah lama, dan sosialisasi itu pada tahun 2000 lalu. namun pemerintah belum berbuat untuk menjadikan gula dalam

negeri dapat bersaing di dalam negeri,” ujarnya kepada parlemen baru-baru ini.

Menurut Abdul Wachid, pemerintah harus mampu melindungi produksi dalam negeri jangan sampai mereka kalah dengan produk luar. “Kalau tidak diproteksi maka produksi mereka akan kalah bersaing. itu yang harus dikedepankan oleh pemerintah Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, perlu adanya sinergi antar kementerian kalau ingin memberikan dukungannya terhadap



Tim Kunker Komisi VI DPR saat meninjau Pabrik Gula Gempol Kerep, Jatim

industri gula. “Kalau tidak membangun sinergi maka tidak akan bisa jalan. Kebijakan untuk swasembada gula harus didukung kementerian BUMN, perdagangan, pertanian, perindustrian, kalau berjalan secara ego sentral maka tidak akan jalan itu,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Pabrik Gula Gempol Kerep, lanjut Wachid, Komisi VI DPR melihat bahwa Pabrik Gula tersebut telah melakukan inovasi terbaru dari produk turunan tebu, seperti Bio Etanol dan pupuk. “Jadi produknya dapat berguna untuk para petani, karena limbah etanol jika tidak diproses menjadi pupuk akan menjadi limbah yang berbahaya,” katanya. (sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.

DPR Minta Bendungan Wariori Selesai Tepat Waktu

Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi penyelesaian Proyek Bendungan Sungai Wariori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pembangunan dengan anggaran multi years ini diharapkan bisa tuntas pada akhir tahun 2016.

“Kami mendesak supaya program yang memang beberapa tahun ini ke depannya jangan lagi ada pemotongan atau penghematan yang pada akhirnya proyek *multi years* ini menjadi *delay*. Pada akhirnya tidak sesuai kesepakatan kontrak awal, itu yang biasanya terjadi,” kata Ketua Komisi V Michael Wattimena usai melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan, Senin (23/2/15).

Ia menyebut proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara, PT Brantas Abipraya (Persero) dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki seharusnya bisa tuntas tepat waktu.

“Soal eskalasi daripada kenaikan berbagai harga itu nanti akan dihitung di kemudian hari, tetapi minimal apa yang sudah dikerjakan dan yang telah disepakati ini betul-betul bisa tuntas pada 2016 dan masyarakat segera merasakan manfaatnya,” ujar Michael wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua Barat ini.



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau proyek Bendungan Sungai Wariori

Sementara itu Kepala Balai wilayah Sungai Papua Barat, Ditjen Sumber Daya Air, Muhammad Asidin Thalid mengatakan proyek ini merupakan program yang berjalan dari tahun anggaran 2013-2016. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp238 miliar dalam pembangunan ini.

“Saat ini pembangunan bendungan ini sudah mencapai 60-70 persen. Bendungan ini akan dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah seluas 3016 hektar di Distrik Sidey, Masni dan Prafi” ungkap dia. (ry/iky) foto: rizka/parle/hr





Tim Kunker Komisi V ke Papua Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena mengunjungi Kabupaten/Kota Manokwari, Sorong, dan Raja Ampat (23-26/02)
Foto: Rizka/Parle/HR



Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Lembar meninjau infrastruktur di NTB (23-26/02)
Foto: Andri/Parle/HR



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Sodik Mudjahid meninjau Rumah Janda Lanjut Usia Terlantar di Manado Senin (23/02) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Sidak Komisi IX DPR RI ke PT Kalbe Farma Cikarang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Pius Lustrilanang (kiri) dan Rumah Sakit Siloam Tangerang (kanan), Jumat (20/02)
Foto: Iwan Armanias, Naefurodji/Parle/HR

